



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



Analisis Capaian dan Kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kudus

Gisela Adio Ros Maria^{1✉}

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus

✉ giselaadio@gmail.com

Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata kunci:

Kabupaten Kudus,
kesenjangan
pendidikan,
pembangunan
pendidikan, Rata-Rata
Lama Sekolah

Abstrak

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator strategis dalam menilai capaian pembangunan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis capaian serta kesenjangan RLS di Kabupaten Kudus sebagai dasar perumusan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, dokumen perencanaan daerah, serta literatur terkait pembangunan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun capaian RLS Kabupaten Kudus mengalami peningkatan, masih terdapat kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial. Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, akses dan keberlanjutan pendidikan menengah, kualitas layanan pendidikan, serta perbedaan kondisi sosial ekonomi antar kecamatan. Selain itu, efektivitas implementasi kebijakan pendidikan daerah dan koordinasi lintas perangkat daerah belum sepenuhnya optimal dalam mendukung peningkatan RLS secara merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan afirmatif berbasis wilayah, peningkatan sinergi lintas perangkat daerah, serta integrasi program pendidikan dengan kebijakan perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perumusan kebijakan strategis untuk mempercepat peningkatan RLS dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan di Kabupaten Kudus.

Article

Information

History :

Received :

Revised :

Accepted :

Keywords:

Kudus Regency,
educational disparities,
educational
development, Rata-Rata
Lama Sekolah

Abstract

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) is a strategic indicator used to assess educational development and the quality of human resources at the regional level. This study aims to analyze the achievement and disparities of RLS in Kudus Regency as a basis for formulating more effective and equitable education policies. The research employs a descriptive-analytical approach using secondary data from Statistics Indonesia, regional planning documents, and relevant literature on educational development. The findings indicate that although the RLS in Kudus Regency has increased, significant disparities persist across regions and social groups. These disparities are influenced by household economic conditions, access to and continuity of secondary education, the quality of educational services, and socio-economic differences among districts. In addition, the effectiveness of local education policy implementation and inter-agency coordination has not been fully optimized to support equitable improvements in RLS. This study recommends

strengthening area-based affirmative policies, enhancing cross-sectoral coordination among local government agencies, and integrating education programs with social protection and poverty alleviation policies. The findings are expected to support policy evaluation and the formulation of strategic interventions to accelerate improvements in RLS and promote sustainable human resource development in Kudus Regency.

ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor kunci dalam pembangunan sumber daya manusia daerah karena berperan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas pendidikan berdampak pada kemampuan individu dalam mengakses kesempatan ekonomi, sosial, dan politik yang lebih luas (Sukmawati & et al., 2023). Tinggi rendahnya capaian pendidikan penduduk sering digunakan sebagai indikator kemajuan suatu daerah dalam konteks pembangunan regional (Sukmawati & et al., 2023). Daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan capaian pendidikan yang rendah. Pendidikan juga menjadi fondasi utama dalam pembentukan modal manusia yang berkualitas dan produktif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan prasyarat penting dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Kharisma et al., 2024). Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sektor sosial, tetapi juga sebagai investasi strategis bagi pembangunan jangka panjang suatu wilayah (Ainur Oktania & et al., 2024b).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa investasi di bidang pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pembangunan manusia di berbagai daerah. Pendidikan berperan sebagai sarana utama dalam meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Di Provinsi Papua, investasi modal manusia melalui pendidikan terbukti mampu meningkatkan capaian pembangunan manusia sejalan dengan implementasi kebijakan otonomi khusus. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan di daerah dengan tantangan struktural yang kompleks (Ainur Oktania & et al., 2024a). Peningkatan akses dan kualitas pendidikan menjadi faktor penting dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah. Dimensi pendidikan juga berkontribusi besar terhadap peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia, terutama di daerah yang masih tertinggal (Kharisma et al., 2024). Dengan demikian, pendidikan merupakan instrumen kebijakan yang krusial dalam mendorong pemerataan pembangunan daerah (Sukmawati & et al., 2023).

Dalam konteks pengukuran pembangunan pendidikan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai keberlanjutan pendidikan penduduk secara kuantitatif (Raffi, 2025). RLS mencerminkan sejauh mana penduduk mampu menyelesaikan jenjang pendidikan formal yang ditempuh sepanjang hidupnya (Nur Mahmudah & et al., 2024). Peningkatan RLS menunjukkan keberhasilan daerah dalam mempertahankan partisipasi penduduk dalam sistem pendidikan formal (Nur Mahmudah & et al., 2024). Penelitian di Kota Surabaya menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu tahun RLS dapat meningkatkan IPM secara signifikan (Raffi, 2025). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa RLS memiliki dampak langsung terhadap kualitas pembangunan manusia (Raffi, 2025). Analisis regresi logistik Bayesian di Jawa Timur juga membuktikan bahwa RLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM (Nur Mahmudah & et al., 2024). Oleh karena itu, RLS menjadi indikator strategis yang sering digunakan dalam evaluasi kinerja pembangunan pendidikan daerah (Erly Nofriyanty Manurung & et al., 2021).

Sebagai salah satu komponen utama Indeks Pembangunan Manusia, RLS memberikan kontribusi yang substansial dalam pembentukan nilai IPM di berbagai daerah (Ainur Oktania & et al., 2024b). Penelitian di Provinsi Papua menunjukkan bahwa RLS bersama indikator pendidikan dan kesehatan lainnya memberikan kontribusi hampir sempurna terhadap IPM (Ainur Oktania & et al., 2024a). Di Nusa Tenggara Timur, analisis jalur menunjukkan bahwa RLS memiliki kontribusi langsung yang

cukup besar terhadap peningkatan IPM daerah (Irvana Arofah & et al., 2019). Kontribusi simultan RLS dengan indikator lain memperlihatkan kuatnya hubungan antara pendidikan dan pembangunan manusia (Irvana Arofah & et al., 2019). Meskipun terdapat penelitian yang menemukan pengaruh RLS tidak signifikan di wilayah perkotaan tertentu, hasil tersebut bersifat kontekstual (Rifa'i & et al., 2017). Sebagian besar kajian empiris menunjukkan konsistensi peran RLS sebagai indikator kunci pembangunan manusia (Erly Nofriyanty Manurung & et al., 2021). Dengan demikian, RLS tetap dipandang sebagai komponen vital yang merepresentasikan kualitas sumber daya manusia suatu daerah (Tisa Zindy Meilinna & et al., 2023).

Perkembangan nilai Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kudus pada periode 2024–2025 menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025). Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Kudus, nilai RLS Kabupaten Kudus pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,34 tahun. Pada tahun 2025, nilai RLS meningkat menjadi 9,51 tahun yang menandakan adanya tambahan lama sekolah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya mempertahankan partisipasi pendidikan masyarakat (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025). Namun demikian, capaian RLS tersebut masih menggambarkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kudus baru menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas belum sepenuhnya tercapai secara merata (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025). Oleh karena itu, meskipun tren RLS meningkat, capaian tersebut masih memerlukan penguatan kebijakan pendidikan daerah.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan target Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 9,54 tahun pada tahun 2025 sebagai bagian dari sasaran pembangunan pendidikan daerah (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025). Jika dibandingkan dengan realisasi capaian tahun 2025 sebesar 9,51 tahun, masih terdapat selisih sebesar 0,03 tahun dari target yang direncanakan. Perbandingan antara target dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa laju peningkatan RLS belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Meskipun selisih capaian relatif kecil, kondisi ini penting untuk dicermati sebagai bagian dari evaluasi kinerja pembangunan pendidikan. Ketidaktercapaian target RLS mengindikasikan adanya hambatan dalam proses peningkatan lama sekolah penduduk (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025). Hambatan tersebut berpotensi memengaruhi keberhasilan pencapaian indikator pendidikan lainnya dalam pembangunan manusia daerah. Dengan demikian, perbandingan target dan realisasi RLS menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas kebijakan pendidikan daerah (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025).

Adanya kesenjangan antara target dan realisasi capaian Rata-Rata Lama Sekolah menunjukkan indikasi permasalahan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kudus. Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS) pada berbagai jenjang pendidikan yang menghambat peningkatan lama sekolah penduduk secara agregat (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025). Selain itu, tantangan keberlanjutan pendidikan pada masa transisi antar jenjang, khususnya dari SMP ke SMA, turut berkontribusi terhadap belum optimalnya capaian RLS (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025). Faktor ekonomi keluarga dan biaya pendidikan lanjutan juga menjadi kendala dalam mempertahankan partisipasi pendidikan penduduk usia sekolah. Di sisi lain, kualitas pembelajaran yang tercermin dari capaian literasi dan numerasi yang belum sepenuhnya memenuhi target nasional turut memengaruhi keberlanjutan pendidikan (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025). Kesenjangan capaian RLS ini tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, identifikasi kesenjangan RLS menjadi penting sebagai dasar perumusan intervensi kebijakan pendidikan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Hani'ah & Mami Hajaroh (2024) menemukan bahwa tren RLS berdasarkan jenis kelamin menunjukkan pola yang berbeda, di mana RLS laki-laki mengikuti model *s-curve* dengan fluktuasi tertentu, sedangkan RLS perempuan cenderung meningkat mengikuti *quadratic trend*. Penelitian Nurulpaik (2011) mencatat bahwa RLS di Provinsi Jawa Barat meningkat sebesar 1,25 tahun dalam kurun waktu 1993–2006 dengan laju pertumbuhan rata-rata 2,37 persen per tahun. Namun demikian,

capaian RLS antarprovinsi masih timpang, sebagaimana ditunjukkan oleh Firdaus & Arcana (2023) yang melaporkan bahwa Jawa Tengah memiliki RLS terendah di Kawasan Barat Indonesia pada tahun 2022. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan RLS tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbedaan kapasitas daerah dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis RLS perlu mempertimbangkan konteks wilayah dan karakteristik sosial ekonomi daerah.

Faktor ekonomi, akses pendidikan, serta kualitas layanan pendidikan merupakan determinan utama capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan pendapatan keluarga, biaya pendidikan lanjutan, dan status kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap ketahanan bersekolah dan risiko putus sekolah (Ampristi & Setiadi, 2020; Diana, 2021; Fitria et al., 2025). Dari sisi kebijakan, dukungan fiskal melalui Dana Alokasi Khusus dan belanja daerah fungsi pendidikan terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan RLS dan penurunan ketimpangan capaian pendidikan (Nurmutiazifah & Yuniasih, 2021; Rahmadi & Pudjihardjo, 2020). Selain itu, kualitas pembelajaran dan retensi siswa juga berperan penting, yang dipengaruhi oleh profesionalisme guru, pemerataan distribusi pendidik, serta kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah (Arjun Wahyudi, 2024; Hani'ah & Mami Hajaroh, 2024). Temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa peningkatan RLS memerlukan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan, adaptif terhadap karakteristik wilayah, dan terintegrasi dengan upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan (Fitria et al., 2025; Rahmadani et al., 2024).

Di sisi lain, evaluasi capaian indikator pembangunan daerah, termasuk Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek perencanaan, metodologi, maupun kapasitas implementasi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa banyak indikator kinerja daerah belum mencapai target RPJMD akibat lemahnya perumusan target yang realistis serta evaluasi yang masih berfokus pada capaian angka tanpa analisis penyebab ketidaktercapaian, diperparah oleh rendahnya kesesuaian antara RKP dan RKPD serta belum optimalnya respons daerah terhadap kebijakan Dana Alokasi Khusus (Adrianto et al., 2023; Bidang Perencanaan Pendataan Dan Evaluasi, 2022; Pambudi, 2024; Setyo Pambudi, 2020). Selain itu, penggunaan metodologi analisis kesenjangan dan pemanfaatan data daerah yang valid dan terintegrasi dalam evaluasi indikator pendidikan masih belum optimal, sehingga analisis capaian pembangunan cenderung parsial dan kurang akurat (Hermawati, 2018; Putra et al., 2023). Keterbatasan kapasitas teknis aparatur daerah, kondisi geografis, serta perbedaan kemampuan monitoring antarwilayah turut memperkuat tantangan dalam implementasi dan evaluasi RPJMD (Lestari et al., 2018; Sahri et al., 2022; Wibiseno, 2023). Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis capaian dan kesenjangan RLS berbasis target pembangunan daerah melalui pendekatan deskriptif yang didukung data daerah terkini, sebagai upaya memperkuat evaluasi kebijakan pendidikan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Kudus berdasarkan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan capaian RLS pada periode 2024–2025 serta membandingkannya dengan target RPJMD Kabupaten Kudus. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesenjangan antara target dan realisasi capaian RLS sebagai indikator adanya permasalahan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan daerah. Melalui analisis deskriptif berbasis data daerah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja indikator RLS. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan pendidikan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Kudus.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul *Analisis Capaian dan Kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus* ini dilakukan menggunakan metode analisis data sekunder yang bersumber dari dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data statistik sektor pendidikan dan literatur ilmiah yang relevan dengan kajian Rata-Rata Lama Sekolah dan pembangunan pendidikan daerah. Analisis difokuskan pada perkembangan capaian RLS Kabupaten Kudus serta perbandingan antara target yang ditetapkan dalam RPJMD dengan realisasi capaian indikator. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi besaran kesenjangan capaian RLS dan mengkaji implikasinya sebagai indikasi permasalahan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan daerah. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja indikator RLS serta menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan pendidikan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator pendidikan yang mengukur rata-rata lamanya pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk dalam suatu wilayah dan menjadi salah satu variabel utama dalam pembentukan indeks pendidikan pada Indeks Pembangunan Manusia (Bayu Kharisma et al., 2024). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas berdasarkan jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan (Erly Nofriyanty Manurung et al., 2021). RLS tidak hanya merepresentasikan capaian pendidikan secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikan formal (Erly Nofriyanty Manurung et al., 2021). Nilai RLS yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan penduduk agar tetap bersekolah dalam jangka waktu yang lebih lama (Bayu Kharisma et al., 2024). Oleh karena itu, RLS sering digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pendidikan di tingkat nasional maupun daerah (Erly Nofriyanty Manurung et al., 2021). Penggunaan RLS sebagai indikator memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pendidikan yang telah dilaksanakan (Bayu Kharisma et al., 2024). Dengan demikian, RLS menjadi indikator strategis dalam menilai keberlanjutan pendidikan penduduk suatu wilayah (Erly Nofriyanty Manurung et al., 2021).

Dalam konteks pembangunan pendidikan, RLS berperan sebagai indikator kunci untuk mengukur ketercapaian peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia suatu daerah (Erly Nofriyanty Manurung et al., 2021). Peningkatan RLS terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh Muhammad Raffi et al. (2025) yang menemukan bahwa setiap kenaikan satu tahun RLS dapat meningkatkan IPM sebesar 6,13 poin. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan yang berhasil meningkatkan lama sekolah penduduk berkontribusi langsung terhadap pembangunan manusia (Muhammad Raffi et al., 2025). RLS juga menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan pendidikan, khususnya dalam menganalisis tren capaian pendidikan penduduk (Munnal Hani'ah et al., 2024). Analisis tren RLS dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan seperti penguatan profesionalisme guru, implementasi wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan sistem penjaminan mutu pendidikan (Munnal Hani'ah et al., 2024). Dengan demikian, RLS tidak hanya berfungsi sebagai indikator evaluatif, tetapi juga sebagai instrumen perencanaan pembangunan pendidikan (Erly Nofriyanty Manurung et al., 2021). Peran strategis RLS menjadikannya salah satu indikator utama dalam perumusan kebijakan pendidikan berbasis bukti (Munnal Hani'ah et al., 2024).

Rata-Rata Lama Sekolah juga memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai aspek pembangunan lainnya, baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Ginanjar Agung Rahmadi et al. (2020) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan belanja daerah fungsi pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan RLS. Selain itu, pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan merupakan variabel yang paling signifikan dalam memengaruhi RLS, terutama di provinsi dengan capaian IPM di bawah rata-rata nasional (Bayu Kharisma et al., 2024). Namun demikian, hubungan RLS dengan tingkat kemiskinan menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana dalam beberapa kasus peningkatan RLS justru memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, yang mengindikasikan perlunya analisis lebih mendalam terhadap kualitas dan relevansi pendidikan (Salsabilla Luthfia Karunia Putri et al., 2025). Upaya peningkatan RLS juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan nonformal yang disetarakan dengan pendidikan formal melalui proses penilaian

penyetaraan (Asep Saepudin et al., 2022). Peningkatan kompetensi asesor dalam assessment center menjadi salah satu strategi penting untuk mendukung percepatan peningkatan RLS melalui pendidikan nonformal (Asep Saepudin et al., 2022). Selain itu, variasi tren RLS berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan perbedaan karakteristik penduduk, di mana RLS laki-laki dan perempuan menunjukkan pola tren yang berbeda (Munnal Hani'ah et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan daerah, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kudus menempati posisi strategis sebagai indikator kinerja utama sektor pendidikan yang berkontribusi langsung terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025–2029, RLS digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia daerah. Nilai RLS mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan pendidikan penduduk, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Capaian RLS yang masih berada pada kisaran penyelesaian pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama menunjukkan bahwa tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus masih terletak pada keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan RLS tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan dasar, tetapi juga dengan keberhasilan mempertahankan peserta didik agar melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, RLS menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas pembangunan pendidikan daerah secara menyeluruh (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025).

Dilihat dari tren capaian, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus pada periode 2024–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat. Berdasarkan data RPJMD, nilai RLS Kabupaten Kudus pada tahun 2024 tercatat sebesar 9,34 tahun dan meningkat menjadi 9,51 tahun pada tahun 2025. Peningkatan sebesar 0,17 tahun tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan lama sekolah penduduk. Tren ini mengindikasikan bahwa berbagai intervensi kebijakan pendidikan yang dilaksanakan mulai memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan pendidikan masyarakat. Meskipun demikian, laju peningkatan tersebut masih relatif moderat jika dibandingkan dengan kebutuhan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan RLS memerlukan konsistensi kebijakan dan penguatan program pendidikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, tren peningkatan RLS perlu terus dipantau sebagai bagian dari evaluasi kinerja pembangunan pendidikan daerah (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025).

Tabel 1. Capaian dan Target Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus

Tahun	Capaian RLS (Tahun)	Target RPJMD (Tahun)	Selisih (Tahun)
2024	9,34	-	-
2025	9,51	9,54	0,03

Sumber: RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus, capaian RLS tahun 2025 masih menunjukkan adanya selisih. Target RLS Kabupaten Kudus pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 9,54 tahun, sementara realisasi capaian baru mencapai 9,51 tahun. Selisih sebesar 0,03 tahun tersebut menunjukkan bahwa target pembangunan pendidikan daerah belum sepenuhnya tercapai. Meskipun selisihnya relatif kecil, kondisi ini tetap penting untuk dicermati sebagai indikasi adanya hambatan struktural dalam peningkatan lama sekolah penduduk. Ketidaktercapaian target RLS dapat berdampak pada capaian indikator pembangunan manusia lainnya. Oleh karena itu, analisis terhadap tren dan posisi RLS menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus dapat dipahami sebagai indikator strategis yang mencerminkan keberhasilan pembangunan pendidikan sekaligus kualitas sumber daya manusia daerah. Posisi RLS yang masih berada pada kisaran penyelesaian pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama menunjukkan bahwa tantangan utama pembangunan pendidikan di Kabupaten Kudus terletak pada keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas.

Tren peningkatan RLS pada periode 2024–2025 mengindikasikan adanya kemajuan, namun capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan RLS memerlukan upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi melalui kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, analisis terhadap capaian RLS menjadi penting untuk menilai kinerja pembangunan pendidikan daerah secara lebih mendalam. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara rinci capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus berdasarkan data dan indikator pembangunan yang tersedia.

2. Analisis Capaian Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kudus merupakan salah satu indikator kunci dalam menilai keberhasilan pembangunan pendidikan daerah. Berdasarkan data dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025–2029, RLS digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberlanjutan pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas. Nilai RLS mencerminkan rata-rata lama waktu yang ditempuh penduduk dalam menyelesaikan pendidikan formal. Oleh karena itu, capaian RLS menjadi gambaran agregat keberhasilan pemerintah daerah dalam mempertahankan partisipasi pendidikan masyarakat. Analisis capaian RLS tidak hanya melihat peningkatan nilai secara numerik, tetapi juga menilai makna capaian tersebut dalam konteks jenjang pendidikan yang berhasil diselesaikan. Dengan demikian, pembahasan capaian RLS perlu dikaitkan dengan tujuan pembangunan pendidikan daerah secara menyeluruh (RPJMD Kabupaten Kudus, 2025).

Pada tahun 2024, capaian RLS Kabupaten Kudus tercatat sebesar 9,34 tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Kudus telah menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama. Capaian ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan dasar di Kabupaten Kudus relatif telah terpenuhi. Namun demikian, nilai RLS tersebut juga menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas masih menjadi tantangan utama. Kondisi ini menandakan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama. Oleh karena itu, capaian RLS tahun 2024 mencerminkan keberhasilan parsial pembangunan pendidikan yang masih memerlukan penguatan pada jenjang pendidikan lanjutan (RPJMD Kabupaten Kudus, 2025).

Pada tahun 2025, capaian RLS Kabupaten Kudus meningkat menjadi 9,51 tahun. Peningkatan sebesar 0,17 tahun dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya peningkatan lama sekolah penduduk. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa sebagian penduduk berhasil memperpanjang masa pendidikannya melalui pendidikan formal maupun jalur penyetaraan. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan daerah yang dilaksanakan mulai memberikan dampak positif. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih tergolong moderat apabila dibandingkan dengan kebutuhan percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan RLS memerlukan konsistensi kebijakan dan dukungan lintas sektor agar dapat berlangsung secara berkelanjutan (RPJMD Kabupaten Kudus, 2025).

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kudus, capaian RLS tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi sasaran pembangunan daerah. Target RLS pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 9,54 tahun, sementara realisasi capaian baru mencapai 9,51 tahun. Selisih sebesar 0,03 tahun menunjukkan adanya gap antara perencanaan dan realisasi capaian indikator. Meskipun selisih tersebut relatif kecil, kondisi ini tetap penting untuk dicermati dalam evaluasi kinerja pembangunan pendidikan. Ketidaktercapaian target RLS mengindikasikan adanya hambatan dalam mempertahankan partisipasi pendidikan penduduk secara optimal. Dengan demikian, analisis capaian RLS perlu dilanjutkan dengan identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidaktercapaian target tersebut (RPJMD Kabupaten Kudus, 2025).

Tabel 2. Evaluasi Capaian RLS Terhadap Target RPJMD Kabupaten Kudus 2025-2029

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Interpretasi Jenjang Pendidikan	Status Capaian
Rata-Rata Lama Sekolah	9,54	9,51	Setara SMP	Belum Tercapai

Sumber: RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

Secara substantif, capaian RLS Kabupaten Kudus juga perlu dilihat dari makna pendidikan yang berhasil ditempuh oleh penduduk. Nilai RLS yang berada pada kisaran 9,5 tahun menunjukkan bahwa rata-rata penduduk belum sepenuhnya menyelesaikan pendidikan menengah atas. Kondisi ini berimplikasi pada kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah dan dunia kerja. Rendahnya keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah atas berpotensi membatasi peningkatan kualitas tenaga kerja daerah. Oleh karena itu, capaian RLS perlu dikaitkan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan. Analisis ini menegaskan bahwa capaian RLS tidak hanya berorientasi pada angka, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang dihasilkan (RPJMD Kabupaten Kudus, 2025).

Sebagai penutup, capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus pada periode 2024–2025 menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan adanya kemajuan pembangunan pendidikan daerah. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Nilai RLS yang masih berada pada kisaran penyelesaian pendidikan setara SMP menunjukkan bahwa tantangan utama terletak pada keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan pendidikan yang berfokus pada retensi peserta didik dan perluasan akses pendidikan lanjutan. Oleh karena itu, capaian RLS perlu terus dimonitor dan dievaluasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Pembahasan selanjutnya akan mengkaji kesenjangan capaian RLS serta faktor-faktor yang memengaruhinya secara lebih mendalam.

3. Analisis Kesenjangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah

Kesenjangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kudus dapat dipahami sebagai selisih antara kondisi aktual lama sekolah penduduk dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Meskipun capaian RLS menunjukkan tren peningkatan, peningkatan tersebut belum sepenuhnya mampu memenuhi sasaran yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan belum berlangsung secara optimal dan merata. Analisis kesenjangan menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pendidikan daerah mampu menjawab permasalahan struktural pendidikan. Kesenjangan RLS tidak hanya bersifat numerik, tetapi juga mencerminkan tantangan keberlanjutan pendidikan penduduk. Oleh karena itu, analisis ini berfokus pada perbandingan antara target, realisasi, serta faktor-faktor penghambat peningkatan lama sekolah. Dengan memahami kesenjangan yang terjadi, arah perbaikan kebijakan pendidikan dapat dirumuskan secara lebih tepat.

Berdasarkan hasil analisis, kesenjangan capaian RLS Kabupaten Kudus terutama terlihat pada belum tercapainya target RLS tahun berjalan. Target RLS yang ditetapkan dalam RPJMD mencerminkan harapan peningkatan lama sekolah penduduk secara bertahap. Namun, realisasi capaian menunjukkan bahwa peningkatan tersebut masih berada sedikit di bawah target. Selisih capaian yang relatif kecil menunjukkan adanya upaya peningkatan, tetapi belum cukup untuk mencapai sasaran yang direncanakan. Kondisi ini menandakan bahwa laju peningkatan RLS masih menghadapi hambatan tertentu. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek sosial, ekonomi, maupun kelembagaan pendidikan. Dengan demikian, kesenjangan capaian RLS mencerminkan adanya tantangan dalam efektivitas implementasi kebijakan pendidikan daerah.

Salah satu faktor utama penyebab kesenjangan capaian RLS adalah masih adanya Anak Tidak Sekolah (ATS) pada berbagai jenjang pendidikan. Keberadaan ATS secara langsung menurunkan rata-

rata lama sekolah penduduk karena kelompok ini tidak berkontribusi terhadap peningkatan lama sekolah. Selain itu, transisi pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama ke Sekolah Menengah Atas masih menjadi titik rawan putus sekolah. Banyak penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas karena berbagai keterbatasan. Faktor ekonomi keluarga, kebutuhan bekerja, serta biaya pendidikan lanjutan menjadi kendala utama. Kondisi ini menyebabkan keberlanjutan pendidikan penduduk belum berjalan optimal. Akibatnya, capaian RLS sulit meningkat secara signifikan meskipun akses pendidikan dasar relatif telah terpenuhi.

Kesenjangan capaian RLS juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial ekonomi antarwilayah di Kabupaten Kudus. Wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah cenderung memiliki tingkat keberlanjutan pendidikan yang lebih rendah pula. Keterbatasan akses terhadap pendidikan menengah atas turut memperlebar kesenjangan capaian lama sekolah. Selain itu, faktor budaya dan preferensi keluarga terhadap pendidikan juga memengaruhi keputusan melanjutkan sekolah. Dalam beberapa kasus, pendidikan formal belum sepenuhnya dipandang sebagai kebutuhan utama setelah pendidikan dasar. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan RLS tidak hanya memerlukan penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga perubahan pola pikir masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan RLS mencerminkan permasalahan multidimensional yang saling berkaitan.

Untuk memperjelas bentuk dan karakter kesenjangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus, diperlukan pemetaan kesenjangan yang tidak hanya berfokus pada selisih angka capaian, tetapi juga pada dimensi struktural yang memengaruhi keberhasilan pembangunan pendidikan. Kesenjangan capaian RLS mencerminkan adanya perbedaan antara kondisi ideal yang direncanakan dalam dokumen pembangunan daerah dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, analisis kesenjangan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mengidentifikasi jenis kesenjangan, kondisi yang melatarbelakanginya, serta dampaknya terhadap capaian RLS dan pembangunan sumber daya manusia daerah. Pemetaan ini penting untuk memahami bahwa permasalahan RLS bersifat multidimensional dan saling terkait. Ringkasan pemetaan bentuk kesenjangan capaian RLS beserta implikasinya terhadap pembangunan pendidikan Kabupaten Kudus disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemetaan Bentuk Kesenjangan RLS dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Pendidikan Kabupaten Kudus

Dimensi Kesenjangan	Kondisi yang Ditemukan	Dampak Terhadap RLS	Implikasi Pembangunan
Kesenjangan Perencanaan	Target RPJMD belum tercapai.	Selisih capaian RLS.	Efektivitas kebijakan menurun.
Kesenjangan Keberlanjutan	Banyaknya penduduk berhenti pendidikan pada jenjang SMP.	RLS stagnan pada jenjang pendidikan menengah pertama.	Pendidikan menengah belum optimal.
Kesenjangan Partisipasi	Anak Tidak Sekolah (ATS) masih ditemukan.	Menurunkan rata-rata lama sekolah.	SDM rentan tertinggal.
Kesejangan Sosial-Ekonomi	Biaya dan kebutuhan untuk bekerja.	Adanya anak putus sekolah lanjutan.	Ketimpangan kualitas SDM.
Kesenjangan Tata Kelola	Program belum tepat sasaran	Dampak kebijakan terbatas.	Perlunya penguatan koordinasi.

Sumber: Olahan penulis (2025)

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 3, terlihat bahwa kesenjangan capaian RLS Kabupaten Kudus tidak hanya dipengaruhi oleh faktor perencanaan, tetapi juga oleh aspek keberlanjutan pendidikan, partisipasi penduduk, kondisi sosial ekonomi, serta tata kelola penyelenggaraan pendidikan daerah. Kesenjangan keberlanjutan pendidikan, khususnya pada transisi dari jenjang SMP ke SMA, menjadi faktor yang paling besar dalam menahan peningkatan RLS. Selain itu, masih ditemukannya Anak Tidak Sekolah menunjukkan bahwa sebagian penduduk belum terintegrasi secara optimal dalam sistem pendidikan formal. Faktor sosial ekonomi keluarga turut memperkuat risiko putus sekolah dan

membatasi keberlanjutan pendidikan penduduk usia sekolah. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan efektivitas program dan koordinasi antarperangkat daerah menyebabkan dampak kebijakan pendidikan belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, kesenjangan capaian RLS merupakan hasil interaksi berbagai faktor struktural yang memerlukan penanganan terpadu melalui kebijakan pendidikan daerah yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, kesenjangan capaian RLS juga menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan dan implementasi program pendidikan daerah. Program peningkatan partisipasi pendidikan belum sepenuhnya menjangkau kelompok sasaran yang paling rentan. Koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung keberlanjutan pendidikan masih perlu diperkuat. Selain itu, keterbatasan data mikro pendidikan menyebabkan intervensi kebijakan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan spesifik wilayah. Monitoring dan evaluasi program pendidikan juga masih perlu ditingkatkan agar hambatan dapat diidentifikasi sejak dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan RLS tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem penyelenggaraan pendidikan daerah. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pendidikan menjadi aspek penting dalam menutup kesenjangan capaian RLS.

Sebagai penutup, analisis kesenjangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa peningkatan RLS masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan sosial ekonomi. Kesenjangan antara target dan realisasi mencerminkan perlunya penguatan kebijakan pendidikan yang lebih terarah dan adaptif. Permasalahan ATS, transisi antarjenjang pendidikan, serta ketimpangan kondisi wilayah menjadi faktor utama yang perlu mendapatkan perhatian. Selain itu, penguatan perencanaan, koordinasi, dan pemanfaatan data pendidikan menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan capaian RLS. Dengan mengatasi faktor-faktor tersebut secara terpadu, peningkatan RLS diharapkan dapat berlangsung lebih optimal. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan implikasi kebijakan dari temuan kesenjangan capaian RLS tersebut.

4. Faktor Penyebab Kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah

Kesenjangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat struktural, sosial, dan kelembagaan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan membentuk hambatan dalam upaya peningkatan lama sekolah penduduk secara berkelanjutan. Meskipun akses pendidikan dasar relatif telah terpenuhi, keberlanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi masih menghadapi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan RLS tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan sekolah, tetapi juga dengan kemampuan penduduk untuk bertahan dalam sistem pendidikan. Faktor penyebab kesenjangan RLS perlu dianalisis secara komprehensif agar kebijakan yang dirumuskan tidak bersifat parsial. Dengan memahami akar permasalahan, intervensi pendidikan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, identifikasi faktor penyebab menjadi bagian penting dalam evaluasi pembangunan pendidikan daerah.

Untuk merangkum faktor-faktor utama yang menyebabkan kesenjangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus, diperlukan penyajian yang sistematis dan ringkas. Berbagai faktor penyebab yang telah diuraikan menunjukkan bahwa kesenjangan RLS tidak disebabkan oleh satu aspek tunggal, melainkan oleh kombinasi faktor sosial, ekonomi, akses pendidikan, kualitas pembelajaran, dan tata kelola kebijakan. Penyajian dalam bentuk tabel membantu memperjelas hubungan antara faktor penyebab, permasalahan inti, dan dampaknya terhadap capaian RLS. Dengan demikian, tabel berikut memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor utama penyebab kesenjangan RLS di Kabupaten Kudus.

Tabel 4. Faktor Penyebab Kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus

Faktor Penyebab	Bentuk Permasalahan	Dampak Terhadap RLS
Anak Tidak Sekolah (ATS)	Tidak terlibat dalam pendidikan formal.	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menurun.
Kondisi Ekonomi Keluarga	Terbatasnya biaya pendidikan lanjutan.	Risiko putus sekolah meningkat.
Transisi SMP ke SMA	Tidak melanjutkan jenjang pendidikan SMA.	RLS stagnan pada jenjang pendidikan setara SMP.
Akses Pendidikan Menengah	Terbatasnya jarak dan daya tampung sekolah.	Partisipasi pendidikan menurun.
Kualitas dan Relevansi Pendidikan	Rendahnya motivasi belajar.	Retensi pendidikan lemah.
Pendidikan Nonformal	Terbatasnya pemanfaatan jalur penyetaraan pendidikan.	Potensi peningkatan RLS belum optimal.
Tata Kelola Pendidikan	Program belum tepat sasaran.	Efektivitas kebijakan rendah.

Sumber: RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029.

Berdasarkan ringkasan pada Tabel 4, terlihat bahwa kesenjangan capaian RLS di Kabupaten Kudus dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Faktor Anak Tidak Sekolah dan kondisi ekonomi keluarga menjadi pemicu awal yang berkontribusi langsung terhadap rendahnya keberlanjutan pendidikan. Hambatan pada transisi pendidikan dari SMP ke SMA serta keterbatasan akses pendidikan menengah memperbesar risiko putus sekolah. Di sisi lain, kualitas dan relevansi pendidikan yang belum optimal memengaruhi motivasi peserta didik untuk bertahan dalam sistem pendidikan. Faktor tata kelola kebijakan yang belum sepenuhnya tepat sasaran turut membatasi efektivitas intervensi pendidikan daerah. Oleh karena itu, penanganan kesenjangan RLS memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Salah satu faktor utama penyebab kesenjangan RLS adalah masih ditemukannya Anak Tidak Sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Keberadaan kelompok ini secara langsung menurunkan nilai rata-rata lama sekolah karena tidak berpartisipasi dalam pendidikan formal. Anak Tidak Sekolah umumnya berasal dari kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan sosial. Selain itu, sebagian anak terpaksa meninggalkan sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Kondisi ini menyebabkan keberlanjutan pendidikan penduduk tidak dapat terjaga secara optimal. Dampaknya, peningkatan RLS menjadi lambat meskipun akses pendidikan dasar tersedia. Faktor ini menunjukkan bahwa peningkatan RLS memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada sistem pendidikan, tetapi juga pada perlindungan sosial.

Faktor ekonomi keluarga juga menjadi penyebab penting kesenjangan capaian RLS di Kabupaten Kudus. Keterbatasan pendapatan keluarga sering kali memengaruhi keputusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah atas. Biaya pendidikan lanjutan, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi beban yang cukup berat bagi sebagian rumah tangga. Selain itu, kebutuhan untuk bekerja sejak usia muda turut mendorong anak meninggalkan sekolah lebih awal. Kondisi ini menyebabkan partisipasi pendidikan menurun pada jenjang yang lebih tinggi. Akibatnya, rata-rata lama sekolah penduduk sulit meningkat secara signifikan. Faktor ekonomi ini menunjukkan bahwa peningkatan RLS tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Transisi pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama ke Sekolah Menengah Atas merupakan titik kritis yang berkontribusi besar terhadap kesenjangan RLS. Pada tahap ini, banyak peserta didik yang tidak melanjutkan pendidikan karena berbagai kendala. Keterbatasan akses sekolah menengah atas, baik dari sisi jarak maupun daya tampung, menjadi salah satu faktor penghambat. Selain itu, motivasi belajar yang menurun setelah menyelesaikan pendidikan dasar juga memengaruhi keberlanjutan pendidikan. Kurangnya dukungan lingkungan dan keluarga memperbesar risiko putus

sekolah pada fase transisi ini. Kondisi tersebut menyebabkan RLS cenderung stagnan pada kisaran penyelesaian pendidikan setara SMP. Oleh karena itu, penguatan transisi antar jenjang pendidikan menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan RLS.

Dari sisi kualitas dan relevansi pendidikan, kesenjangan RLS juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap manfaat pendidikan lanjutan. Apabila pendidikan tidak dipandang memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap peluang kerja, motivasi untuk melanjutkan sekolah menjadi rendah. Kualitas pembelajaran yang belum merata turut memengaruhi minat peserta didik untuk bertahan dalam sistem pendidikan. Selain itu, keterbatasan layanan pendidikan nonformal dan penyetaraan pendidikan menyebabkan jalur alternatif peningkatan lama sekolah belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini mempersempit pilihan bagi penduduk yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara penuh. Akibatnya, potensi peningkatan RLS melalui jalur nonformal belum tergarap maksimal. Faktor ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas dan fleksibilitas sistem pendidikan.

Faktor terakhir yang turut memengaruhi kesenjangan capaian RLS adalah aspek tata kelola dan implementasi kebijakan pendidikan daerah. Program peningkatan partisipasi dan keberlanjutan pendidikan belum sepenuhnya terintegrasi antarperangkat daerah. Keterbatasan data pendidikan yang rinci menyulitkan penargetan program secara tepat. Selain itu, monitoring dan evaluasi program pendidikan belum optimal dalam mendeteksi hambatan sejak dini. Hal ini menyebabkan intervensi kebijakan sering kali bersifat umum dan kurang menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. Kondisi tersebut memperlambat upaya penutupan kesenjangan capaian RLS. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pendidikan menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan peningkatan RLS..

5. Peran Perangkat Daerah dalam Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah

Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus memerlukan peran aktif perangkat daerah secara terkoordinasi dan berkelanjutan. Upaya peningkatan RLS tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan pendidikan formal, tetapi juga pada dukungan ekosistem pendidikan yang mencakup aspek literasi, budaya, dan karakter masyarakat. Setiap perangkat daerah memiliki kontribusi strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam mendukung keberlanjutan pendidikan penduduk. Sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci dalam mengatasi faktor penyebab putus sekolah dan rendahnya retensi pendidikan. Pendekatan lintas sektor memungkinkan intervensi pendidikan dilakukan secara lebih komprehensif dan adaptif. Dengan demikian, peran perangkat daerah perlu dipahami sebagai satu kesatuan sistem pembangunan pendidikan daerah. Subbab ini menguraikan peran strategis perangkat daerah utama dalam mendukung peningkatan RLS di Kabupaten Kudus.

Tabel 5. Peran Perangkat Daerah dalam Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kudus

Perangkat Daerah	Peran Utama	Strategi Peningkatan RLS
Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga.	Penguatan layanan pendidikan formal dan penurunan risiko putus sekolah.	Penguatan kurikulum adaptif; peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan; penjangkauan Anak Tidak Sekolah; intervensi transisi SMP–SMA; perluasan akses beasiswa dan bantuan pendidikan.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Penguatan ekosistem budaya pendukung keberlanjutan pendidikan.	Pembinaan literasi budaya dan karakter; integrasi kegiatan budaya dengan pendidikan informal; pengembangan festival dan ruang kreatif edukatif; kolaborasi muatan lokal berbasis budaya dalam pembelajaran.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Penguatan literasi masyarakat dan dukungan layanan Pendidikan.	Pengembangan perpustakaan desa dan pojok baca sekolah; layanan literasi <i>mobile</i> ; peningkatan infrastruktur dan digitalisasi koleksi; penguatan Gerakan Literasi Sekolah; perbaikan tata kelola arsip pendidikan.

Sumber: RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2025-2029

Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga memegang peran sentral dalam peningkatan RLS melalui penguatan kualitas layanan pendidikan formal dan penurunan risiko putus sekolah. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan mutu pembelajaran melalui penguatan kurikulum yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, peningkatan kompetensi guru menjadi fokus utama melalui pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sertifikasi, serta pendampingan berkelanjutan. Strategi ini bertujuan memastikan kualitas pembelajaran yang lebih merata dan menarik bagi siswa. Dinas ini juga berperan aktif dalam penjangkauan Anak Tidak Sekolah serta intervensi pada fase transisi pendidikan dari SMP ke SMA. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkecil risiko putus sekolah pada jenjang kritis. Selain itu, perluasan akses layanan pendidikan dilakukan melalui koordinasi dengan sekolah, komite, dan pemerintah desa dalam penyaluran beasiswa serta bantuan pendidikan bagi keluarga rentan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berperan dalam menciptakan ekosistem budaya yang mendukung keberlanjutan pendidikan. Peran ini diwujudkan melalui penguatan literasi budaya, pembentukan karakter, dan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Program pembinaan kebudayaan diarahkan untuk menanamkan nilai disiplin, etos belajar, serta apresiasi terhadap budaya lokal di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selain itu, integrasi kegiatan budaya dengan pendidikan informal dilakukan melalui festival budaya edukatif, ruang kreatif, dan pelatihan seni berbasis edukasi bagi pelajar. Strategi ini bertujuan meningkatkan keterlibatan dan motivasi belajar peserta didik. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga memperkuat kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk mengintegrasikan muatan lokal berbasis budaya ke dalam aktivitas pembelajaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan retensi siswa.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkontribusi dalam peningkatan RLS melalui penguatan literasi masyarakat dan dukungan layanan pendidikan. Peran ini diwujudkan melalui pengembangan program literasi masyarakat berbasis perpustakaan desa, pojok baca sekolah, serta layanan literasi keliling yang menjangkau wilayah dengan akses terbatas. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur perpustakaan dan digitalisasi koleksi bahan bacaan dilakukan untuk memperluas akses belajar mandiri bagi siswa dan masyarakat. Dinas ini juga berperan dalam perbaikan tata kelola arsip pendidikan, termasuk data administrasi sekolah, dokumen kelulusan, dan data pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan arsip yang tertib dan akurat mendukung perencanaan serta evaluasi kebijakan pendidikan daerah. Kolaborasi dengan sekolah dalam pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah turut memperkuat budaya baca. Upaya tersebut secara tidak langsung berkontribusi terhadap keberlanjutan pendidikan dan peningkatan RLS.

Secara keseluruhan, peran Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menunjukkan bahwa peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus memerlukan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Setiap perangkat daerah berkontribusi melalui fungsi yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antarperangkat daerah menjadi faktor kunci dalam mengatasi faktor penyebab kesenjangan RLS yang bersifat multidimensional. Dengan koordinasi yang kuat, intervensi pendidikan dapat menjangkau kelompok sasaran secara lebih efektif. Subbab ini menegaskan bahwa peningkatan RLS merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk merumuskan simpulan atas capaian, tantangan, dan arah peningkatan RLS di Kabupaten Kudus yang dibahas dalam bagian berikutnya.

SIMPULAN

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator strategis yang mencerminkan keberhasilan pembangunan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kudus. Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian RLS Kabupaten Kudus pada periode 2024–2025 mengalami peningkatan, namun masih berada pada kisaran penyelesaian pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa akses pendidikan dasar relatif telah terpenuhi, sementara keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas masih menjadi tantangan utama. Perbandingan antara target dan realisasi capaian RLS menunjukkan adanya kesenjangan, meskipun dalam besaran yang relatif kecil. Kesenjangan ini menegaskan bahwa laju peningkatan RLS belum sepenuhnya sesuai dengan sasaran pembangunan pendidikan daerah. Oleh karena itu, capaian RLS perlu dimaknai tidak

hanya sebagai peningkatan angka, tetapi juga sebagai refleksi kualitas dan keberlanjutan pendidikan penduduk.

Analisis kesenjangan capaian RLS mengungkap bahwa permasalahan yang dihadapi bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Faktor Anak Tidak Sekolah, kondisi sosial ekonomi keluarga, transisi pendidikan dari SMP ke SMA, keterbatasan akses pendidikan menengah, serta kualitas dan relevansi pembelajaran menjadi penyebab utama belum optimalnya peningkatan RLS. Selain itu, aspek tata kelola dan implementasi kebijakan pendidikan daerah juga memengaruhi efektivitas upaya peningkatan lama sekolah penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan RLS tidak dapat dicapai melalui intervensi sektoral semata. Sebaliknya, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi akar permasalahan yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan. Dengan demikian, kesenjangan capaian RLS mencerminkan tantangan struktural pembangunan pendidikan daerah yang memerlukan perhatian serius.

Peran perangkat daerah menjadi faktor kunci dalam upaya peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Kudus. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki kontribusi strategis dalam membangun ekosistem pendidikan yang mendukung keberlanjutan sekolah dan peningkatan literasi masyarakat. Sinergi lintas perangkat daerah memungkinkan intervensi pendidikan dilakukan secara lebih komprehensif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan RLS merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah, bukan hanya sektor pendidikan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, perencanaan berbasis data, dan integrasi kebijakan lintas sektor menjadi prasyarat utama dalam mendorong peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah secara berkelanjutan di Kabupaten Kudus.

SARAN

Pemerintah Kabupaten Kudus disarankan untuk memperkuat kebijakan peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dengan menitikberatkan pada keberlanjutan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguatan intervensi pada fase transisi pendidikan dari SMP ke SMA, khususnya bagi kelompok penduduk yang berisiko putus sekolah. Penjangkauan Anak Tidak Sekolah perlu dilakukan secara lebih sistematis dan berbasis data untuk memastikan intervensi tepat sasaran. Selain itu, perluasan akses bantuan pendidikan dan beasiswa bagi keluarga rentan menjadi langkah penting dalam menjaga partisipasi pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan RLS secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Kudus.

Perlu ditingkatkan sinergi lintas perangkat daerah dalam mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Kearsipan dan Perpustakaan perlu terus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program-program yang mendukung peningkatan RLS. Integrasi program literasi, budaya, dan penguatan karakter ke dalam ekosistem pendidikan daerah menjadi strategi penting untuk meningkatkan minat dan retensi belajar peserta didik. Selain itu, pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan penguatan Gerakan Literasi Sekolah perlu dioptimalkan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan inklusif.

Dari sisi perencanaan dan evaluasi, pemerintah daerah disarankan untuk memperkuat penggunaan data daerah yang akurat dan terkini dalam pemantauan capaian Rata-Rata Lama Sekolah. Evaluasi berkala terhadap kesenjangan antara target dan realisasi RLS perlu dilakukan sebagai dasar penyesuaian kebijakan pendidikan. Penguatan kapasitas aparatur daerah dalam analisis data dan evaluasi kinerja pembangunan pendidikan juga menjadi kebutuhan penting. Dengan perencanaan yang berbasis data dan evaluasi yang berkelanjutan, kebijakan peningkatan RLS diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Kudus secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Kudus, terutama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus yang telah menyediakan data dan informasi penting yang mendukung penelitian ini. Selain itu, penulis

berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta bantuan teknis selama proses penyusunan artikel ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, D. W., Cahyono, D. D., & Valianto, E. B. (2023). PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA DAERAH KOTA MALANG. *PANGRIPTA*, 6(1), 1078–1089. <https://doi.org/10.58411/s1ckw738>
- Ainur Oktania & et al. (2024a). Analisis kontribusi indikator pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 101–115.
- Ainur Oktania & et al. (2024b). Pengaruh rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan angka harapan hidup terhadap IPM di Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 45–60.
- Ampristi, B., & Setiadi, Y. (2020). KETAHANAN BERSEKOLAH PENDUDUK USIA 7-18 TAHUN DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 621–630. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.187>
- Arjun Wahyudi. (2024). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2022-2023. *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 2(2), 45–52. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i2.53>
- Bidang Perencanaan Pendataan Dan Evaluasi. (2022). REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018-2023. *PANGRIPTA*, 5(1), 882–891. <https://doi.org/10.58411/pangripta.v5i1.141>
- Diana, R. (2021). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISWA PUTUS SEKOLAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT. *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 14(2). <https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i2.497>
- Erly Nofriyanty Manurung & et al. (2021). Pengaruh indikator pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 25–38.
- Firdaus, A., & Arcana, I. M. (2023). Ketahanan Penduduk Usia 7-18 Tahun untuk Menuntaskan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2023(1), 797–806. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2023i1.1851>
- Fitria, D. A., Akbar, G. G., Ulumudin, A., Kania, I., & Yudiardi, D. (2025). Determinants of Average Years of Schooling in Garut Regency: An Exploratory Factor Analysis Approach. *Jurnal Edusci*, 2(4), 344–365. <https://doi.org/10.62885/edusci.v2i4.655>
- Hani'ah, M. & Mami Hajaroh. (2024). TREN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PERENCANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SRAGEN. *PERISAI: Jurnal Pendidikan Dan Riset Ilmu Sains*, 3(1), 87–96. <https://doi.org/10.32672/perisai.v3i1.712>
- Hermawati, D. T. (2018). ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2017. *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(1). <https://doi.org/10.30742/jisa.v18i1.446>
- Irvana Arofah & et al. (2019). Analisis pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ekonomi Regional*, 7(2), 89–104.
- Kharisma, B., Wardhana, A., & Zidan Fauzy, M. (2024). FAKTOR YANG MEMENGARUHI UPAYA PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM): KASUS IPM PROVINSI YANG MASIH DIBAWAH IPM NASIONAL. *Buletin Studi Ekonomi*, 133. <https://doi.org/10.24843/BSE.2024.v29.i02.p03>
- Lestari, L., Rini, D. M., & Dwiyanti, N. (2018). EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. *JURNAL TRIAS POLITIKA*, 2(2), 203. <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1469>
- Nur Mahmudah & et al. (2024). Analisis regresi logistik Bayesian faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Jawa Timur. *Jurnal Statistika Dan Aplikasi*, 9(2), 55–70.

- Nurmutiazifah, A., & Yuniasih, A. F. (2021). PENERAPAN MODEL REGRESI DATA PANEL: DETERMINAN KETIMPANGAN CAPAIAN PENDIDIKAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA (KTI) 2015-2019. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 1294–1304. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.705>
- Nurulpaik, I. (2011). STUDI DESKRIPTIF PENCAPAIAN INDEK PENDIDIKAN DALAM KOMPOSIT IPM JAWA BARAT TAHUN 1993-2006. *Jurnal MANAJERIAL*, 10(1), 42–52. <https://doi.org/10.17509/manajerial.v10i1.1821>
- Pambudi, A. S. (2024). ANALISIS GAP PERENCANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR EKONOMI BERKELANJUTAN PADA 34 PROVINSI DI INDONESIA. *JURNAL RISET PEMBANGUNAN*, 7(1), 22–36. <https://doi.org/10.36087/jrp.v7i1.174>
- Pemerintah Kabupaten Kudus. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kabupaten Kudus.
- Putra, A. R., Silfiana, S., & Afriani, R. I. I. (2023). REFLEKSI HASIL PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN PERIODE 2005—2025. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 7(2), 182–195. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v7i2.259>
- Raffi, M. (2025). Analisis Rata-Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 135–139. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.407>
- Rahmadani, A. H. N., Hutabarat, J. P., Prakoso, N. N. P., & Kartiasih, F. (2024). Pengaruh Kepemilikan Fasilitas Telekomunikasi dan Akses Internet terhadap Capaian Proses Pendidikan di Indonesia. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2024(1), 309–320. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2024i1.2172>
- Rahmadi, G. A., & Pudjihardjo, M. (2020). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Bidang Pendidikan*. Universitas Brawijaya.
- Rifa'i, A. & et al. (2017). Pengaruh indikator pendidikan terhadap IPM wilayah perkotaan di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 41–53.
- Sahri, Salmah, E., Harsono, I., Masrun, M., & Firmansyah, F. (2022). PELATIHAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DI DESA GEGELANG KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Jurnal Abdimas Independen*, 3(1), 95–111. <https://doi.org/10.29303/independen.v3i1.140>
- Setyo Pambudi, A. (2020). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. *Bappenas Working Papers*, 3(1), 88–100. <https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58>
- Sukmawati, U. & et al. (2023). Peran pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusia daerah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembangunan*, 5(3), 201–215.
- Tisa Zindy Meilinna & et al. (2023). Peran pendidikan dalam pembangunan manusia di kota-kota Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 11(2), 133–148.
- Wibiseno, T. (2023). Pengukuran Kemampuan Kabupaten/Kota untuk Pencapaian Target Indikator Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Bappenas Working Papers*, 6(3), 254–273. <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i3.194>